

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aarje Tehupeiorry. 2017. *Makna Konsinyasi Pengadaan tanah Untuk Kepentingan Umum*. Raih Asah Sukses. Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana. Jakarta.
- Andi Pangerang, Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Depok.
- Bernhard Limbong. 2015. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Margaretha Pustaka. Jakarta.
- Dwi Wulan Titik A, Mujiati, Abdul Haris Farid. 2019. *Problematisasi Pengadaan Tanah Skala Kecil (Studi Pengadaan Tanah Skala Kecil di Jawa Barat)*. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPPM), Badan Senat Taruna (BST) & STPN Press. Yogyakarta.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Fatchul Mu'in. 2014. *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Ar. Ruzz Media. Jogjakarta.
- H.M Arba. 2109. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Sinar Grafika Jakarta. Jakarta.
- Irwansyah, Ahsan Yunus (Ed.). 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Kamus Bahasa Indonesia. 2008. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah. 2015 *Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum; Upaya Hukum Masyarakat yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Muwahid. 2020. *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Duta Media Publishing. Pamekasan Jawa Timur.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana. Jakarta.
- Soedharyo Soimin. 2004. *Status Hak dan Pembebasan Tanah (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Tim Panca Aksara. 2020. *Kamus Istilah Hukum*. Desa Pustaka Indonesia. Temanggung, Jawa Tengah.
- Tim Sanggar Grasindo. 2010. *Membiasakan Perilaku Sikap yang Terpuji: Sebuah Pengantar untuk Pendidikan Karakter*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Tjahjunulin Domai. 2011. *Desentralisasi (Paradigma Baru dalam Pemerintah Lokal dan Hubungan Antar Pemerintah Daerah*. UB Press. Malang.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Walikota Makassar Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan

Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Jurnal/artikel

Abdul Rokhim. Kewenangan Pemerintahan dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 19 Nomor 316 Februari-Mei 2013.

Amin Asgaf. Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Sampah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Lex Privatum Vol. 5 Nomor 10 Desember 2017.

Androvaga Renandra Tetama, Suharno, Yaritza Nafa Tyola. Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung; Memaknai Konsultasi Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengadaan Tanah. Jurnal Widya Bhumi Vol. 2 Nomor 2 Oktober 2022.

Angraini Christy Lumantouw. Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jurnal Lex Et Societatis Vol. 4 Nomor 5 Mei 2016.

Ana Ramadhona. Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan untuk Pembangunan Jalan *By Pass* di Kota Bukittinggi Vol. 3 Nomor 1 September 2017.

Ari Wuisang. Tanggungjawab Publik terhadap Tindakan Pemerintah dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan. Jurnal Pakuan Law Review Vol. 7 Nomor 2 Juli- Desember 2021.

Cut Nadya Miranti, Yusri. Tanggung Jawab Pemerintah Kota Terhadap Penyelesaian Ganti Kerugian Pembebasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat (Suatu Penelitian Pada Proyek Pembangunan *Fly Over* di Simpang Surabaya, Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol. 2 Nomor 3 Agustus 2018.

- Dekie GG Kasenda. Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Morality* Vol. 2 Nomor 2 Desember 2015.
- Dedy Hernawan. Pengadaan Tanah Dengan Cara Jual Beli Oleh Instansi Pemerintah Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. *Jurnal Litigasi* Vol. 16 Nomor 1 April 2015.
- Djoko Waluyo, Syarifuddin. Praktik Sosialisasi Kebijakan Publik Pada Era Digital. *Jurnal Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa* Vol. 3 Nomor 1 Desember 2022.
- Firzhal Arzhi, Anies Prima, Ady Supryadi. Tanggung Gugat (Pertanggungjawaban) Pemerintah di Indonesia dan Netherland. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol 1 Nomor 7 Juni 2022.
- Hizkia A.M Kaunang. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. 7 Nomor 11 November 2019.
- Kahirunnisah. Tanggung Gugat Kasir terhadap Kerugian Akibat Kelalaiannya di Matahari di Depertement Store Mall Lembuswana Samarinda. *Jurnal Legalitas* Vol. 3 Nomor Nomor 2 Desember 2018.
- Khumairah Zulqaidah, Yashinta K. D. Sutopo, Marly V. Patandianan. Potensi Aplikasi Pebangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di TPA Tamangapa Kota Makassar. *Jurnal Perencanaan dan Wilayah Kota* Vol. 11 Nomor 2 Tahun 2022.
- Luthfi Zaini Khakim. Model Revitalisasi Lahan Dampak Pertambangan Pasir Besi (Perspektif Implementasi Pada Perda Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2010). *Jurnal Pandecta Research Law* Vol. 9 Nomor 1 Januari 2014.
- Mohammad Mulyadi. Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Masalah-masalah Sosial* Vol. 8 Nomor 2 Desember 2017.
- Muhammad Yusrizal. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 Nomor 1 Januari-Juni 2017.
- Muhammad Syarif Nuh. Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 41 Nomor 1 Januari 2012.

- Muhammad Azhar. Relevansi Asas-asas Umum pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara. Jurnal Notarius Vol. 8 Nomor 2 September 2015.
- Ni Luh Ariningsih. Konsep Hak Menguasai Negara terhadap Tanah dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi. Jurnal Ganec Swara Vol. 15 Nomor 1 Maret 2021.
- Nurazima Faizrosadi, Irma Cahyaningtyas. Penitipan Ganti Rugi Pemegang Hak dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Batang. Jurnal Notarius Vol. 13 Nomor 2 Agustus 2020.
- Safi. Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah Sebagai Sarana *Good Governance* di Indonesia. Jurnal Pamotor Vol. 3 Nomor 2 Oktober 2010.
- Puji Lestari. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 Nomor 2 Maret 2020.
- Putu Apriani Kumalasari, I Ketut Sudiarta. Pemberian Ganti Rugi Kepada Pemilik Tanah Atas Penggunaan Tanah Perseorangan Tanpa Pembebasan Oleh Pemerintah Vol. 8 Nomor 3 Tahun 2020.
- Roosdiana Harahap. Kebijakan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Al-Qitsh Law Review Vol. 7 Nomor 1 Tahun 2021.
- Sugiman. Pemerintahan Desa. Jurnal Ilmu Hukum: Binamulia Hukum Vol. 7 Nomor 1 Juli 2018.
- Urip Santoso. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Bidang Pertanahan. Jurnal Hukum Vol. 3 Nomor 2 Desember 2012.
- Wahdah Zainal Imam. Konsepsi Tanggung Gugat Pemerintah dalam Industri Penerbangan. Jurnal Amanna Gappa Vol 28 nomor 1 Maret 2020.
- Winahyu Erwiningsih. Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah (*Bestuurshandeling*) (Suatu Kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum). Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 Nomor 2 September 2006.
- Widyarini I.W. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 4 Nomor 2 April 2007.

Zul Fadli, Zul Rahmat, Imran Ismail. Kinerja Tim persiapan Pengadaan Tanah (Suatu Kajian Tentang Pengadaan Tanah di Provinsi Sulawesi Selatan). Jurnal Ilmiah Administrasi publik dan Bisnis Vol. 1 Nomor 1 Semptember 2019.

Zulkifli Aspan, Ahsan Yunus. *The Right to a Good and Healty Environment: Revitalizing Green Constitution*. Artikel. 2019.

Skripsi

Lailatul Hijriyah. 2022. *Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Temoat Pengelolaan Sampah dan Pembuangan Akhir Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012*". Skripsi. Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mohammad Paurindra Ekasetya. 2015. *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Website

<https://beritakotamakassar.com/berita/2022/03/24/dewan-desak-blhd-percepatan-proses-pembebasan-lahan-tpa/> diakses tanggal 20 Januari 2023

<http://metrotimur.com/menagih-janji-pemilik-lahan-diperbatasan-tpa-tamangapa-pertanyakan-keseriusan-pemkot-makassar/> diakses tanggal 20 Januari 2023.

<https://business-law.binus.ac.id/2016/05/31/mempertanyakan-konsepsi-tanggung-gugat/> diakses tanggal 17 Maret 2023.

https://penerbitdeepublish.com/purposive-sampling/#Teknik_Non-random_Sampling, diakses tanggal 17 Maret 2023.

<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/timbulan>, diakses tanggal 4 April 2023.